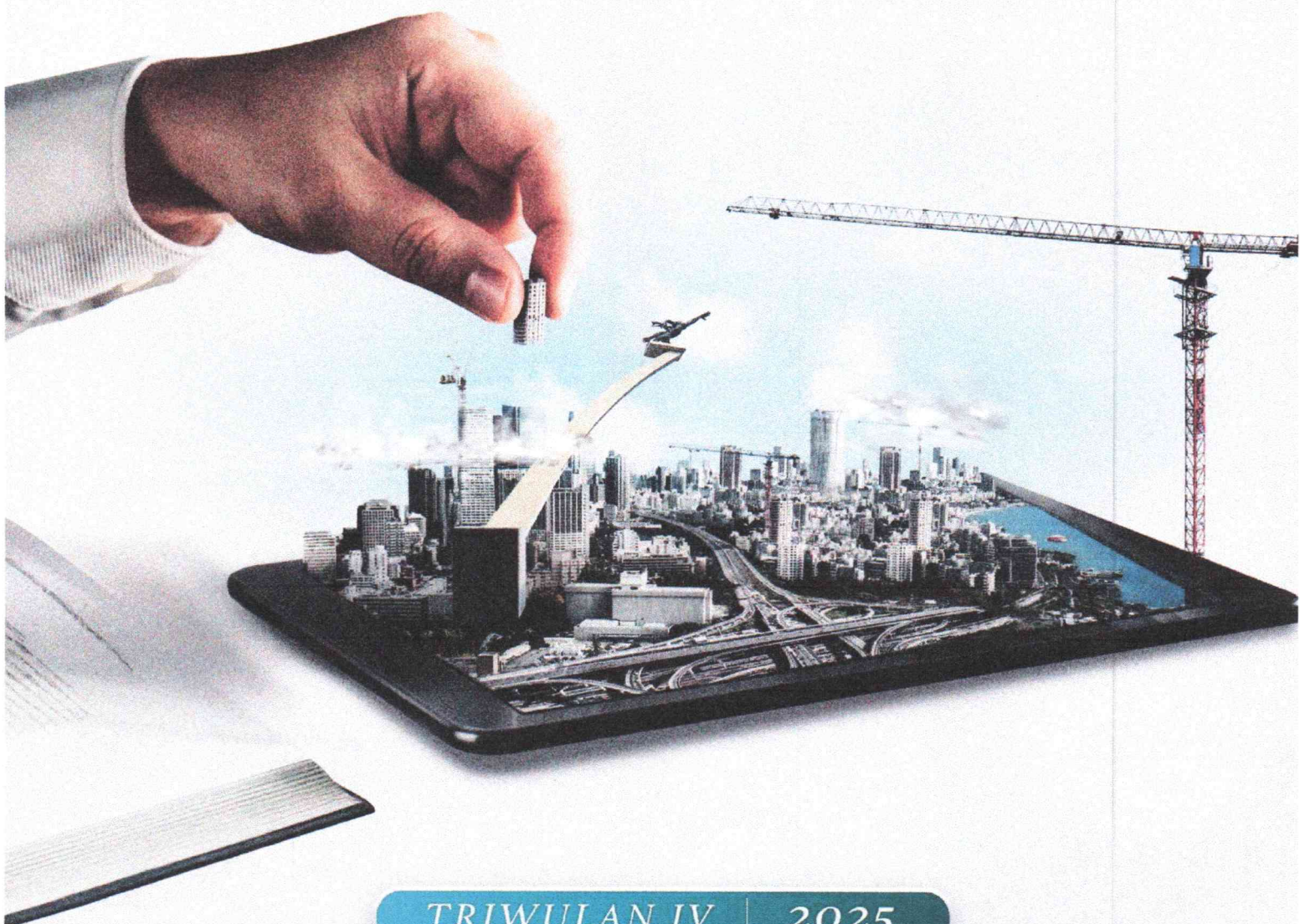




LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN IV | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Elena Oktaviani, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	20-01-2026	
2	Dikonsep	Raden Ayu Anggiita Maharani, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	20-01-2026	
3	Diperiksa	Tengku Hasta Firmansyah, S.Tr.Tra	Ketua Tim Tata Usaha	20-01-2026	
4	Diperiksa	Dony Agung Maulan, S.Tr.Tra	Ketua Tim Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	20-01-2026	
5	Diperiksa	Suprpto, SE	Ketua Tim Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	20-01-2026	
6	Diperiksa	Fariz Hanifan Firdaus, S.Tr.Tra	Ketua Tim Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	20-01-2026	
7	Disetujui	Dinda	Kepala BPTD Kelas III Bengkulu	20-01-2026	



• **KATA**

PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.

Kami Berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun – Tahun mendatang.

Bengkulu, 20 Januari 2026

Kepala BPTD Kelas III Bengkulu



Dinda

NIP. 19810106 200212 2 001



• RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih, dan bertanggung jawab.

Pada Tahun 2025, terdapat Revisi ke-2 Perjanjian Kinerja sehingga ditetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dan 19 (Sembilan Belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan terealisasi sebesar 5 Trayek (target 5 Trayek) tercapai 100%;
2. Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP terealisasi sebesar 1 Lintasan (target 1 Lintasan) tercapai 100%;
3. Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM terealisasi sebesar 2 Unit (target 2 Unit) tercapai 100%;
4. Jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi 1 Unit (target 1 Unit) tercapai 100%;
5. Jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM terealisasi 1 Unit (target 1 Unit) tercapai 100%;
6. Jumlah monitoring evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas pokok dan fungsi LLAJ terealisasi 11 Kegiatan (target 11 Kegiatan) tercapai 100%;
7. Penyusunan dokumen teknis terkait TUSI LLAJ terealisasi 1 Dokumen (target 1 Dokumen) tercapai 100%;
8. Jumlah pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi 1 Unit (target 1 Unit) tercapai 100%;
9. Jumlah operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM terealisasi 2 Unit (target 2 Unit) tercapai 100%;
10. Jumlah pengadaan kegiatan pendukung Uji Kalibrasi terealisasi 2 Paket (target 2 Paket) tercapai 100%;

11. Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis terealisasi 408 Unit (target 408 Unit) tercapai 100%;
12. Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman terealisasi 100% (target 100%) tercapai 100%;
13. Kegiatan perencanaan pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 3 Kegiatan (target 3 Kegiatan) tercapai 100%;
14. Kegiatan terkait akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 80 Nilai (target 80 Nilai) tercapai 100%;
15. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) terealisasi 90 Nilai (target 90 Nilai) tercapai 100%;
16. Tingkat pengelolaan arsip (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) terealisasi 1 Kegiatan (target 1 Kegiatan) tercapai 100%;
17. Tingkat keberhasilan pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) terealisasi 90 Nilai (target 90 Nilai) tercapai 100%;
18. Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa terealisasi 1 Kegiatan (target 1 Kegiatan) tercapai 100%;
19. Kegiatan terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) terealisasi 9 Kegiatan (target 9 Kegiatan) tercapai 100%.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu sebagai mana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 – 2029.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu terus berkomitmen untuk Melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN.....	11
I.1. Latar Belakang.....	11
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi	11
I.3. Sumber Daya Manusia	15
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	16
I.5. Sistematika Laporan	18
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	24
I.6.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	28
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	33
II.1.Tahapan Pengukuran Kinerja	33
II.2. Pengukuran Capaian Kinerja.....	33
II.2.1. SK1.1.1 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	39
II.2.2. SK1.2.1 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	42
II.2.3. SK2.1 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan	45
II.2.4. SK2.2 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	56
II.2.5. SK3.2 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety.....	61
II.2.6. SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	64
II.2.7. SK4 Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat.....	68
II.3.Realisasi Anggaran	84
II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025	84
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	92
II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	95

BAB III.....	75
PENUTUP	75
III.1 Ringkasan Capaian	75
III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	78
LAMPIRAN.....	80
LAMPIRAN 1	80
LAMPIRAN 2	81
LAMPIRAN 3	82
LAMPIRAN 4	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPTD Kelas III Bengkulu Tahun 2025	15
Tabel 1. 2 Rencana Kinerja Tahunan 2025	25
Tabel 1. 3 Revisi I Rencana Kinerja Tahunan 2025	26
Tabel 1. 4 Revisi II Rencana Kinerja Tahunan 2025	27
Tabel 1. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 1. 6 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 1. 7 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
Tabel 2. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
Tabel 2. 2 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 Terhadap Revisi 1 PK	37
Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 Terhadap Revisi 2 PK	38
Tabel 2. 4 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Angkutan Jalan	41
Tabel 2. 5 Tabel Rincian Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025	84
Tabel 2. 6 Tabel Rincian Sumber Dana Pagu Revisi Realokasi I Tahun 2025	84
Tabel 2. 7 Tabel Rincian Sumber Dana Pagu Revisi II Tahun 2025	84
Tabel 2. 8 Rincian Per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025	85
Tabel 2. 9 Tabel Rincian Per Jenis Belanja Pagu Revisi I Tahun 2025	85
Tabel 2. 10 Tabel Rincian Per Jenis Belanja Pagu Revisi II Tahun 2025	85
Tabel 2. 11 Rincian Revisi Per Sumber Dana TA. 2025	87
Tabel 2. 12 Rincian Revisi Per Jenis Belanja TA. 2025	87
Tabel 2. 13 Rincian Realokasi Per Sumber Dana TA. 2025	89
Tabel 2. 14 Rincian Realisasi Anggaran Per Program – Program Kegiatan TA. 2025	89
Tabel 2. 15 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2025	91
Tabel 2. 16 Realisasi Anggaran Triwulan I s.d III per Sasaran Program dan Kegiatan TA. 2025	92
Tabel 2. 17 Realisasi Anggaran Triwulan I s.d IV per Jenis Belanja TA. 2025	93
Tabel 2. 18 Realisasi Anggaran Triwulan I s.d III per Sumber Dana TA. 2025	93
Tabel 2. 19 Efisiensi Sumber Daya Keuangan	95
Tabel 2. 20 Efisiensi Sumber Daya Keuangan Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja	96
Tabel 2. 21 Efisiensi Sumber Daya Keuangan Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja	97
Tabel 2. 22 Analisis Sumber Daya Manusia	98
Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPTD Kelas III Bengkulu	13
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai LLAJSDP, KSOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturmya menjadi 33 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat dengan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

1. Tugas

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

2. Fungsi

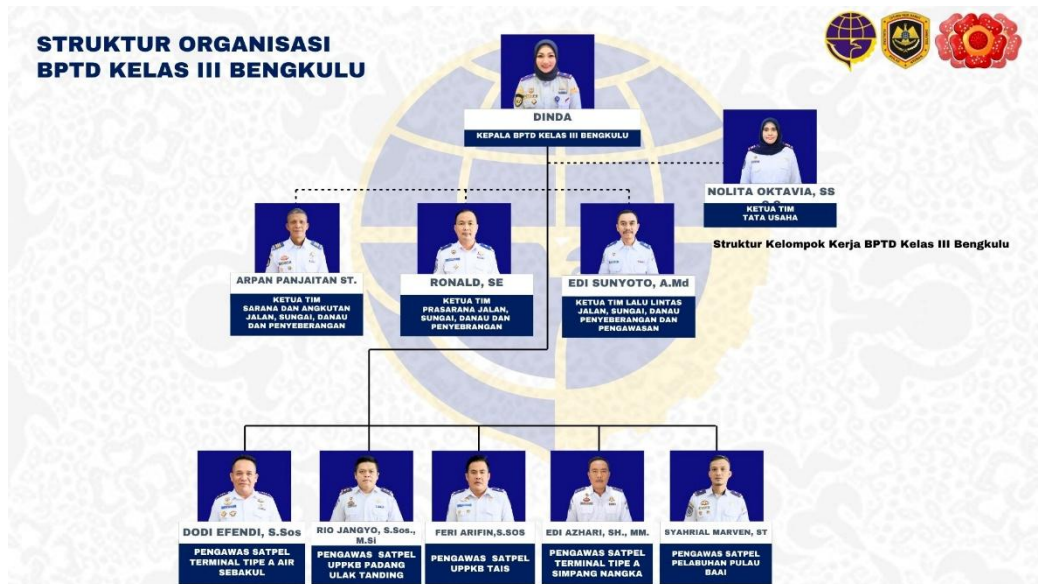
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;

- c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
3. Tipologi (BPTD) terdiri atas :
- a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
 - b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
 - c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta Pelabuhan sungai danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III.
4. Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas :
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Prasarana;
 - c. Bagian Sarana dan Angkutan;
 - d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;

- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.2.1. Bagan Struktur Organisasi



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPTD Kelas III Bengkulu

Tugas dan tanggung jawab masing – masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas Melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan,

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu menaungi sebanyak 162 Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPTD Kelas III Bengkulu Tahun 2025

NO	KETERANGAN	ASN	PPPK	TOTAL
1	KANTOR INDUK	71	5	76
2	TERMINAL SIMPANG NANGKA	13	10	23
3	UPPKB PADANG ULAK TANDING	23	6	29
4	TERMINAL AIR SEBAKUL	24	6	30
5	UPPKB TAIS	1	2	3
6	SATPEL UPPKB MAJE	1	0	3
TOTAL		162		

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu memetakan potensi, Isu Strategis dan Permasalahan yang akan dihadapi.

1. Potensi

- a. Wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu yang meliputi Seluruh Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota;
- b. Dengan adanya sebagian pelimpahan kewenangan pusat ke Balai yang memotong jarak dan waktu birokrasi tentunya akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan transportasi darat akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;
- c. Adanya penambahan sumber daya manusia pada tahun 2025, yang ditempatkan tersebar di satuan pelayanan maupun tim teknis dan tim tata usaha;
- d. Perkembangan teknologi baik peralatan dan informasi beserta personil yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi tersebut yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan mulai tahap perencanaan, pembangunan serta pemeliharaan;
- e. Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah yang dalam hal ini adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu dan Dinas Perhubungan se-Provinsi Bengkulu.

2. Kewenangan

- a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 1) yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009. Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat

diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/ pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

- 1) Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:
- 2) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 3) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan kurang atau terbatasnya SDM yang berkompeten.

4. Anggaran

Terdapat perbedaan antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga BPTD hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

5. Isu Strategis

- 1) Konektivitas Antar Pulau;
- 2) Penanganan kendaraan angkutan barang over dimension dan over load atau ODOL;
- 3) Kepastian hukum untuk penegakan pelanggaran ODOL;

- 4) Transportasi Antar Moda;
- 5) Aset dan Barang Milik Negara;
- 6) Fasilitas Keselamatan.

I.5. Sistematika Laporan

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.3. Tugas Pokok dan Fungsi

I.2.2. Bagan Struktur Organisasi

I.3. Sumber Daya Manusia

I.1. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5. Sistematika Laporan

I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

I.6.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

I.2. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

II.2.1. SK1.1.1 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK

1. IKK1.1.1.A Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2. SK1.2.1 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan

1. IKK1.2.1.B Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3. SK2.1 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan

1. IKK2.1.2 Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. IKK2.1.3 Jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

3. IKK2.1.4 Jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

4. IKK2.1.5 Jumlah monitoring evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas pokok dan fungsi LLAJ

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

5. IKK2.1.6 Penyusunan dokumen teknis terkait TUSI LLAJ

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4. SK2.2 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP

1. IKK2.2.1 Jumlah Pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. IKK2.2.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan penyeberangan sesuai SPM

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5. SK3.2 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety

1. IKK3.2.3 Jumlah pengadaan kegiatan pendukung uji kalibrasi

- a.5) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.6) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.7) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.8) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.6. SK3.3 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan

1. IKK3.3.1 Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. IKK3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.7. SK4 Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

1. IKK4.1 Kegiatan perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**2. IKK4.2 Kegiatan terkait akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP)
Ditjen Perhubungan Darat**

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**3. IKK4.3 Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Dit Teknis
(Nilai IKPA)**

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**4. IKK4.5 Tingkat pengelolaan arsip (Skor) Kementerian
Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)**

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**5. IKK4.6 Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur
oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)**

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

6. IKK4.7 Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

7. IKK4.8 Kegiatan terkait system merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)

- a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

- 1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- 2. Refocusing Anggaran Tahun 2025
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2025

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

- 1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- 3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.3. Penutup

III.3.1. Ringkasan Capaian

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
4. Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025.

I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 – 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2025-2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025-2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 1. 2 Rencana Kinerja Tahunan 2025

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)		SATUAN (4)	TARGET (5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di terminal tipe A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	88
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	20
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	2000
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	Nilai	81
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

Tabel 1. 3 Revisi I Rencana Kinerja Tahunan 2025

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)		SATUAN (4)	TARGET (5)
1	SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	5
2	SK3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK3.2	Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	2
3	SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	2
			IKK6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1
4	SK7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK7.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2
5	SK8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi	IKK8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2
6	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan	Lokasi	1
7	SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.3	Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi	Kegiatan	1
8	SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	234
			IKK11.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	6
9	SK13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4
			IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	21
			IKK4.3	Kegiatan terkait Mauritas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	1
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	10
			IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	8
			IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (SKOR) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
			IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
			IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
			IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	1
			IKK4.11	Kegiatan Pembangunan ZI	Kegiatan	1

Tabel 1. 4 Revisi II Rencana Kinerja Tahunan 2025

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)		SATUAN (4)	TARGET (5)
1	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	5
2	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	1
3	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 2.1.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	2
			IKK 2.1.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
			IKK 2.1.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	1
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	11
			IKK 2.1.6	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen	1
4	SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
			IKK 2.2.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	2
5	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.3	Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi	Paket	2
6	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	408
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	%	100
7	SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
			IKK 4.2	Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	90
			IKK 4.5	Tingkat Pengelolaan Arsip (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	Kegiatan	1
			IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	90
			IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
			IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	9

I.6.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya disebut dengan RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target Kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Pada tahun 2025 terdapat Revisi Rencana Kinerja Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, hal ini dilakukan karena terdapat perubahan pimpinan, nomenklatur dan perubahan DIPA.

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja selanjutnya disebut PK adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu berjalan.

Pada bulan September tahun 2025 telah disahkan Revisi I atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kemudian, pada bulan Desember tahun 2025 telah disahkan kembali Revisi II atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Revisi ini dilakukan karena adanya perubahan pimpinan, nomenklatur dan perubahan DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu. Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)		SATUAN (4)	TARGET (5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di terminal tipe A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	88
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	20
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	2000
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	Nilai	81
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

Tabel 1. 6 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)		SATUAN (4)	TARGET (5)
1	SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	5
2	SK3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK3.2	Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	2
3	SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	2
			IKK6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1
4	SK7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK7.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2
5	SK8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi	IKK8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2
6	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan	Lokasi	1
7	SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.3	Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi	Kegiatan	1
8	SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	234
			IKK11.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	6
9	SK13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4
			IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	21
			IKK4.3	Kegiatan terkait Mauritas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	1
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	10
			IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	8
			IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (SKOR) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
			IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
			IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
			IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	1
			IKK4.11	Kegiatan Pembangunan ZI	Kegiatan	1

Tabel 1. 7 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)		SATUAN (4)	TARGET (5)
1	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	5
2	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	1
3	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 2.1.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	2
			IKK 2.1.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
			IKK 2.1.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	1
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	11
			IKK 2.1.6	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen	1
4	SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
			IKK 2.2.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	2
5	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.3	Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi	Paket	2
6	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	408
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	%	100
7	SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
			IKK 4.2	Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	90
			IKK 4.5	Tingkat Pengelolaan Arsip (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	Kegiatan	1
			IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	90
			IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
			IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	9



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, Program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e - Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II, III dan IV mandiri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <https://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang

direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

a. Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Apabila realisasi semakin tinggi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus 1:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila realisasi makin tinggi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus 2:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 3) Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%

b. Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

- 1) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025;
- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

Tabel 2. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	TARGET PK 2025	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
					T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					75%			100%	
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan		%	100	25	0	0%	50	50	100%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi		Lokasi	2	2	2	100%	2	2	100%
IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan		%	100	25	25	100%	50	50	100%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi		Lokasi	2	2	2	100%	2	2	100%
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat					100%			100%	
IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A		%	55	13,75	13,75	100%	27,5	27,5	100%
IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP		%	88	22	22	100%	44	44	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat					66,66%			66,66%	
IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		%	20	5	5	100%	10	10	100%
IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan		Orang	2000	0	0	0%	0	0	0%
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor		%	74,8	18,7	18,7	100%	37,4	37,4	100%
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat					100%			100%	
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat		Nilai	81	81	81	100%	81	81	100%
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat					100%			100%	
IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat		Nilai	84	84	84	100%	84	84	100%
RATA – RATA PERSENTASE CAPAIAN SASARAN PROGRAM						70%			93,332%	
RATA – RATA PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM						30%			90,90%	
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						9			10	
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						2			1	

Tabel 2. 2 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 Terhadap Revisi 1 PK

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET PK	Triwulan III		
				T	R	C
SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK					100%
IKK 2.1	Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan	Trayek	5	5	5	100%
SK3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal pusat kegiatan (KEK, KSN & KI) lintas negara dan pedesaan antar provinsi					100%
IKK 3.2	Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	2	2	2	100%
SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan					100%
IKK 5	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	2	2	2	100%
IKK 6	Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP	Trayek	1	1	1	100%
SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan					100%
IKK 7.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	2	2	100%
SK8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi					100%
IKK 8.1	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	2	2	100%
SK9	Meningkatnya keselamatan angkutan penumpang dan barang					100%
IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan	Lokasi	1	1	1	100%
SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety					100%
IKK 10.3	Jumlah pengadaan kegiatan pendukung uji kalibrasi	Paket	1	1	1	100%
SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan					164%
IKK 11.1	Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	234	234	378	161%
IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	6	6	10	167%
SK12	Meningkatnya kesadaran attitude & pengguna jalan sesuai pedoman pada Lokasi yang berbeda					0%
IKK 12.1	Pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan	Orang	2000	2000	0	0%
SK13	Meningkatnya layanan manajemen SDM Internal					
IKK 4.1	Kegiatan perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	4	2	50%
IKK 4.2	Kegiatan terkait akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	21	21	16	76%
IKK 4.3	Kegiatan terkait maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	1	1	1	100%
IKK 4.4	Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	10	10	10	100%
IKK4.6	Kegiatan pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	8	8	6	75%
IKK 4.7	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (SKOR) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	2	2	100%
IKK 4.8	Kegiatan digitalisasi arsip	Kegiatan	1	1	1	100%
IKK 4.9	Kegiatan tata Kelola pengadaan barang dan jasa	Kegiatan	1	1	1	100%
IKK 4.10	Kegiatan pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	1	1	1	100%
IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	1	100%
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						95,41%
Rata – Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						96,61%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100%						17
Jumlah Indikator Kinerja Program Kurang dari 100%						4

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 Terhadap Revisi 2 PK

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET PK	Triwulan III		
				T	R	C
SK1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK					100%
IKK 1.1.1.A	Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan	Trayek	5	5	5	100%
SK1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan					100%
IKK1.2.1.B	Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP	Lintasan	1	1	1	100%
SK2.1	Meningkatnya pelayanan public sektor transportasi jalan					100%
IKK2.1.2	Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	2	2	2	100%
IKK2.1.3	Jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SOM	Unit	1	1	1	100%
IKK2.1.4	Jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM	Unit	1	1	1	100%
IKK2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait peningkatan pelayanan Tugas dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	11	11	11	100%
IKK2.1.6	Jumlah Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen	1	1	1	100%
SK2.2	Meninkatnya pelayanan public sektor transportasi ASDP					100%
IKK2.2.1	Jumlah Pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	1	100%
IKK2.2.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan penyeberangan sesuai SPM	Unit	2	2	2	100%
SK3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety					100%
IKK3.2.3	Jumlah pengadaan kegiatan pendukung uji kalibrasi	Paket	2	2	2	100%
SK3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan					100%
IKK3.3.1	Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	408	408	408	100%
IKK3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	%	100	100	100	100%
SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat					100%
IKK4.1	Kegiatan perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	100%
IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	80	100%
IKK4.3	Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	90	90	90	100%
IKK4.5	Tingkat pengelolaan arsip (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	Kegiatan	1	1	1	100%
IKK4.6	Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	90	90	90	100%
IKK4.7	Kegiatan tata Kelola barang dan jasa	Kegiatan	1	1	1	100%
IKK4.8	Kegiatan terkait system merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	9	9	9	100%
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100%
Rata – Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						100%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100%						19
Jumlah Indikator Kinerja Program Kurang dari 100%						0

II.2.1. SK1.1.1 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK

IKK1.1.1.A Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan merupakan perbandingan Jumlah Trayek perintis yang dilayani terhadap Jumlah trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menghubungkan wilayah terisolir, belum berkembang atau wilayah perbatasan dengan kawasan perkotaan yang belum ada pelayanan angkutan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani, juga transportasi yang melayani daerah-daerah potensial (daerah transmigrasi) dengan kawasan perkotaan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan pada tahun 2025 sebanyak 5 trayek jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 5 trayek maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5958 Tahun 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025.

Penetapan jaringan trayek angkutan jalan perintis ditetapkan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan umum pada wilayah tertentu berupa wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani oleh angkutan umum. Dengan adanya penetapan ini dapat diberikan subsidi pengoperasian angkutan jalan perintis berdasarkan perhitungan subsidi pengoperasian angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 5 Trayek, sebagai berikut:

- Banjar Sari – Kahyapu (P. Enggano);
- Muaraaman – Curup – Simpang Nangka;
- Bengkulu – Kerkap – Arga Makmur – Muara Aman;
- Bengkulu – Ulu Manna (Trayek Baru);
- Bengkulu – Kaur (Trayek Baru).

2) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
- Telah berkontraknya kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;
- Dengan adanya layanan angkutan jalan perintis menjadi moda yang terjangkau oleh masyarakat.

3) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Kurangnya pengetahuan masyarakat adanya angkutan jalan perintis yang telah disediakan;
- Masih terdapat jalan-jalan rusak yang belum diperbaiki oleh Pemerintah Daerah;

- Terdapat angkutan plat hitam yang perlu ditertibkan bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

4) Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK1.1.1.A Jumlah layanan subsidi angkutan jalan, yaitu:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja IKK 1.1.1.A} = \frac{1.044}{1.047} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja 1.1.1.A} = 99\%$$

Tabel 2. 4 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Angkutan Jalan

Provinsi	Trayek yang dilayani	Target Volume 1 Tahun	Satuan	Total Realisasi s.d Tw IV	%
BENGKULU	Banjarsari – Kahyapu	282	Rit	280	99%
	Bengkulu – Kerkap –Arga Makmur – Muara Aman	283	Rit	281	99%
	Muara Aman - Curup –Simpang Nangka	281	Rit	279	99%
	Bengkulu – Ulu Manna (Trayek Baru)	105	Rit	105	100%
	Bengkulu – Kaur (Trayek Baru)	96	Rit	100	100%
	Jumlah	1.047	Rit	1.044	99%

5) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK1.1.1.A Jumlah layanan subsidi angkutan jalan, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%.$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan kegiatan 4637.QAH.001 Layanan angkutan jalan perintis (Prioritas Nasional), sebagai berikut:

Pagu	: Rp. 1.953.901.000,-
Realisasi	: Rp. 1.953.899.200,-
% Capaian Keuangan	: 100%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian dimasa yang akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Mengusulkan jaringan trayek perintis baru kepada Direktorat Angkutan Jalan sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah;
- Meningkatkan pelayanan dari bus perintis pada masing-masing trayek, misalnya menggunakan bus ber AC, dengan jam operasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut;
- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota terkait adanya angkutan jalan perintis yang menghubungkan daerah-daerah yang terisolir. Untuk meningkatkan animo masyarakat dalam menggunakan bus perintis tersebut;
- Melakukan monitoring secara rutin ke trayek-trayek bus perintis yang ada di Wilayah kerja BPTD Kelas III Bengkulu.

II.2.2. SK1.2.1 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan

IKK1.2.1.B Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah pelayanan angkutan penyeberangan bersubsidi guna membangun konektivitas antar pulau di Bengkulu. Kegiatan ini berguna untuk mendukung kegiatan perekonomian serta sosial politik Masyarakat di wilayah Bengkulu.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP pada tahun 2025 sebanyak 1 Lintasan jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 1 Lintasan maka Realisasi Kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8618 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 3493 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025.

2) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Telah berkontrak subsidi angkutan penyeberangan perintis mulai tanggal 31 Desember 2024 s.d 31 Desember 2025;
- Harga tiket lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat;
- Adanya peningkatan ekonomi dan peningkatan pembangunan pada daerah yang terlayani;
- Adanya dukungan dan pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan keselamatan (safety) dan keamanan (security) terhadap nahkoda dan ABK;
- Kepastian jam operasional keperintisan angkutan penyeberangan.

3) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan kapal/sarana sehingga jam operasional kapal tidak terlalu banyak;
- Secara komersial belum menguntungkan;

- Sebagian besar angkutan penyeberangan perintis belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya;
 - Faktor cuaca seperti tingginya ombak laut sehingga jadwal keberangkatan kapal ditunda.
- 4) Perhitungan Realisasi Kinerja untuk IKK1.2.1.B Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP, yaitu:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan trayek)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{1}{1} \text{ (dalam satuan trayek)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 1 \text{ Trayek}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK1.2.1.B Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4637.QAH.008 Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional):

Pagu : Rp. 5.626.426.000,-

Realisasi : Rp. 5.625.987.241,-

% Capaian Keuangan : 99.99%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Merencanakan angkutan multimoda untuk menunjang operasional kepererintisan angkutan penyeberangan.

- Diperlukannya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan dan kewenangan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting.
- Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II.2.3. SK2.1 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan

IKK2.1.2 Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe A yang telah dibangun dan dioperasikan serta dikelola oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Jumlah terminal tipe A yang berada di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu sebanyak 2 Lokasi sebagai berikut:

- Terminal Tipe A Air Sebakul (Kota Bengkulu)
- Terminal Tipe A Simpang Nangka (Kabupaten Rejang Lebong, Curup)

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM pada tahun 2025 sebanyak 2 Unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 2 Unit maka capaian kinerja Triwulan IV mencapai 100%

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

- PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

2) Faktor Keberhasilan

- Tingginya *demand* masyarakat untuk menggunakan transportasi umum;
- Informasi pelayanan terminal tersampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi di media sosial;
- Melakukan rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana terminal, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Terminal;
- Menjadikan Terminal sebagai tempat naik dan turun penumpang.

3) Faktor Kegagalan

- Terdapat fasilitas yang rusak dan kurang memadai sehingga membutuhkan rehabilitasi;
- Terdapat beberapa perusahaan bus angkutan yang melayani pembelian tiket melalui agen bus diluar area terminal.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK2.1.2 Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{2}{2} \text{ (dalam satuan Unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 2 \text{ Unit}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK2.1.2 Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM merupakan indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan kegiatan 4638.CDP.040 Terminal Tipe A dikelola, sebagai berikut:

Pagu : Rp. 2.591.038.000,-

Realisasi : Rp. 2.168.173.045,-

% Capaian Keuangan : 83%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan pemanfaatan Terminal Tipe A Simpang Nangka dan Terminal Tipe A Air Sebakul sesuai peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan PNBK;
- Melakukan sosialisasi melalui media sosial terkait waktu pelayanan dan prosedur naik dan turun penumpang melalui Terminal Tipe A dikelola;
- Melakukan evaluasi dan perbaikan fasilitas Terminal Tipe A dikelola.

IKK2.1.3 Jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Fasilitas penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM pada tahun 2025 sebanyak 1

unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 1 unit maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.1) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

2) Faktor Keberhasilan

- Melaksanakan pemeliharaan berkala untuk mencegah kerusakan dan keakuratan alat;
- Ketersediaan teknologi pendukung (WIM, CCTV, ANPR dan sistem digital);
- Memiliki SDM yang berkompeten (penguji kendaraan bermotor).

3) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

- Alat penimbangan tidak akurat atau rusak;
- Penegakan hukum lemah;
- Kurangnya edukasi tentang dampak ODOL terhadap jalan dan keselamatan.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK2.1.3 Jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan untuk memenuhi SPM, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{1}{1} \text{ (dalam satuan unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 1 \text{ unit}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK2.1.3 Jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan untuk memenuhi SPM merupakan indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4639.CDP.076 Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) direhabilitasi:

Pagu	: Rp. 363.600.000,-
Realisasi	: Rp. 363.114.300,-
% Capaian Keuangan	: 99.87%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melaksanakan sosialisasi ODOL kepada pemilik perusahaan;
- Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan secara rutin;
- Penerapan sanksi tegas dan konsisten.

IKK2.1.4 Jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Fasilitas Penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang.

Satuan pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut dengan Satpel UPPKB adalah Unit Kerja dibawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan pengoperasian Fasilitas Penimbangan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM pada tahun 2025 sebanyak 1 unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 1 unit maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

2) Faktor Keberhasilan

- Terlaksananya kegiatan operasional penimbangan pada UPPKB dikelola;
- Terdapat pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor;
- Terdapat fasilitas penimbangan pada UPPKB yang mendukung kegiatan pengawasan angkutan barang.

3) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

- Alat penimbangan tidak akurat atau rusak;
- Penegakan hukum lemah;
- Kurangnya edukasi tentang dampak ODOL terhadap jalan dan keselamatan.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK2.1.4 Jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{1}{1} \text{ (dalam satuan unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 1 \text{ unit}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK2.1.4 Jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM merupakan indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4639.CDP.077 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola:

Pagu : Rp. 1.352.865.000,-

Realisasi : Rp. 1.076.471.949,-

% Capaian Keuangan : 79%

a.5) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan sosialisasi Over Dimension Over Loading (ODOL);
- Melakukan peringatan kepada kendaraan yang masih melanggar ketentuan;
- Melakukan penindakan kepada kendaraan yang muatannya masih berlebih.

IKK2.1.5 Jumlah monitoring evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas dan fungsi LLAJ

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah monitoring evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas dan fungsi LLAJ pada tahun 2025 sebanyak 11 Kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 11 Kegiatan maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.4) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

2) Faktor Keberhasilan

- Terlaksananya kegiatan tugas pokok dan fungsi LLAJ pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu;
- Forum koordinasi LLAJ berjalan efektif;
- Ketersediaan anggaran untuk perbaikan prasarana pendukung.

3) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

- Keterbatasan anggaran;

- Tidak ada forum koordinasi yang efektif;
- Rekomendasi monev tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK2.1.5 Jumlah monitoring evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas dan fungsi LLAJ, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{11}{11} \text{ (dalam satuan kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 11 \text{ kegiatan}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK2.1.5 Jumlah monitoring evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas dan fungsi LLAJ merupakan indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{11}{11} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4640.EBD.909 Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat:

Pagu : Rp. 5.614.513.000,-

Realisasi : Rp. 1.946.516.929,-

% Capaian Keuangan : 34%

a.6) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Penataan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL);
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala dan berkelanjutan;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain;
- Mengadakan forum LLAJ.

IKK2.1.6 Penyusunan dokumen teknis terkait TUSI LLAJ

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Bangunan Gedung Negara merupakan barang milik negara yang digunakan untuk keperluan dinas dalam rangka menunjang tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Keberadaan bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan teknis yang mencakup aspek fungsionalitas, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta kemudahan, sehingga dapat digunakan secara optimal. Pembangunan gedung negara juga wajib dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat biaya, tidak berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip ramah lingkungan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Penyusunan dokumen teknis terkait TUSI LLAJ pada tahun 2025 sebanyak 1 Dokumen jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 1 Dokumen maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

2) Faktor Keberhasilan

- Tujuan dokumen dirumuskan jelas dan spesifik;
- Data pendukung lengkap;
- Mengikuti standar teknis (SNI dan pedoman kementerian).

3) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

- Minim survei lapangan;
- Waktu penyusunan terlalu singkat.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK2.1.6 Penyusunan dokumen teknis terkait TUSI LLAJ pada tahun 2025, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan dokumen)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{1}{1} \text{ (dalam satuan dokumen)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 1 \text{ dokumen}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK2.1.6 Penyusunan dokumen teknis terkait TUSI LLAJ merupakan indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4640.ABF.001 Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana:

Pagu : Rp. 110.000.000,-

Realisasi : Rp. 98.965.380,-

% Capaian Keuangan : 89%

- a.7) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian dimasa Yang Akan Datang
- Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
- Menyusun kerangka acuan kerja (KAK) secara jelas dan rinci;
 - Menyusun jadwal kerja realistis sejak awal;
 - Melaksanakan survei lapangan yang memadai dan terstandar.

II.2.4. SK2.2 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP

IKK2.2.1 Jumlah pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi merupakan pelabuhan penyeberangan yang telah dibangun dan dioperasikan serta dikelola oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Jumlah pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu sebanyak 2 Lokasi sebagai berikut:

- Pelabuhan Penyeberangan Pulau Baai (Kota Bengkulu)
- Pelabuhan Penyeberangan Kahyapu (Kabupaten Bengkulu Utara, Pulau Enggano)

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebanyak 1 Unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 1 Unit maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8618 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 3493 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022.

2) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan anggaran;
- Jadwal kerja realistis;
- Material sesuai spesifikasi;
- Dukungan pemerintah daerah dan pusat;
- Survei kondisi eksisting.

3) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Ketelambatan pekerjaan yang diakibatkan cuaca buruk.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK2.2.1 Jumlah pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{1}{1} \text{ (dalam satuan Unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 1 \text{ Unit}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK2.2.1 Jumlah pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM merupakan indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4638.CBP.033 Pelabuhan Penyeberangan ditingkatkan:

Pagu	: Rp. 3.500.003.000,-
Realisasi	: Rp. 3.495.196.970 ,-
% Capaian Keuangan	: 99%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Menyusun masterplan pelabuhan penyeberangan jangka menengah dan panjang;
- Menyusun jadwal kerja realistis dan berbasis risiko;
- Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan yang tepat.

IKK2.2.2 Jumlah operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi merupakan pelabuhan penyeberangan yang telah dibangun dan dioperasikan serta dikelola oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Jumlah pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah kerja Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas III Bengkulu sebanyak 2 Lokasi sebagai berikut:

- Pelabuhan Penyeberangan Pulau Baai (Kota Bengkulu)
- Pelabuhan Penyeberangan Kahyapu (Kabupaten Bengkulu Utara, Pulau Enggano)

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM sebanyak 2 Unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 2 Unit maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8618 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 3493 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022.

2) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran TSDP pada pelabuhan penyeberangan.
- Melaksanakan rehabilitasi/peningkatan Pelabuhan penyeberangan, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Pelabuhan.
- Meningkatkan informasi terkait layanan pelabuhan.

3) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Pelabuhan yang memerlukan rehabilitasi dan penyesuaian dermaga untuk berlabuhnya kapal serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak disebabkan oleh bencana alam gempa bumi;
- Masih kurangnya fasilitas-fasilitas di area pelabuhan;
- Belum diterapkan sistem Zonasi pada area pelabuhan.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK2.2.2 Jumlah operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{2}{2} \text{ (dalam satuan Unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 2 \text{ Unit}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK2.2.2 Jumlah operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM merupakan indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan kegiatan 4638.CDP.045 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dikelola:

Pagu	: Rp. 558.130.000,-
Realisasi	: Rp. 504,736,994,-
% Capaian Keuangan	: 90%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Merencanakan angkutan multimoda untuk menunjang operasional kepererintisan angkutan penyeberangan;
- Diperlukannya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan dan kewenangan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting;
- Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II.2.5. SK3.2 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety

IKK3.2.3 Jumlah pengadaan kegiatan pendukung uji kalibrasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang diopersikan di jalan. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar. Uji berkala berutujuan untuk:

- Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan;
- Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor waji Uji Berkala di jalan; dan
- Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety sebanyak 2 Paket jika dibandingkan dengan target Revisi I PK sebesar 2 Paket maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum :

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

2) Faktor Keberhasilan

- Pengadaan alat kalibrasi sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Terlaksananya pemeriksaan fisik rancang bangun sesuai dengan Sertifikat Uji Tipe;
- Mengikuti diklat pengujian kendaraan kalibrasi.

3) Faktor Kegagalan

- Alat Uji Kendaraan tidak memadai;
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kalibrasi jika tidak sesuai dengan Spesikasi Teknis;
- Kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi.

1) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK3.2.3 Jumlah pengadaan kegiatan pendukung uji kalibrasi, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Paket)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{2}{2} \text{ (dalam satuan Paket)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 2 \text{ Paket}$$

2) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 8.1 Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM merupakan indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

3) Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4639.CAC.059 dan 4639.CCC.215 Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor:

Pagu : Rp 2.400.000.000,-

Realisasi : Rp 2.224.137.196,-

% Capaian Keuangan : 92%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Mengadakan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi SDM terhadap petugas penguji berkala kendaraan bermotor;

- Monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- Rutin melakukan kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor.

II.2.6. SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

IKK3.3.1 Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 secara jelas diamanahkan bahwa setiap jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Secara umum perlengkapan jalan dibagi 2 jenis yaitu perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 408 Unit jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 408 Unit maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

2) Faktor Keberhasilan

- Spesifikasi teknis sesuai standar (SNI, Permenhub, Permen PUPR);
- Volume dan lokasi tepat sasaran;
- Kebutuhan jelas berbasis data lalu lintas, tingkat kecelakaan, dan fungsi jalan;
- Pengawasan lapangan aktif (kualitas, waktu, kuantitas).

3) Faktor Kegagalan

- Tumpang tindih kewenangan;
- Keterlambatan pengadaan dan pemasangan;
- Pemotongan anggaran mendadak.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK3.3.1 Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{408}{408} \text{ (dalam satuan Unit)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 408 \text{ Unit}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja IKK3.3.1 Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{408}{408} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun 2025 dengan 4639.RAC.053 Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional):

Pagu : Rp 13.472.860.000,-
Realisasi : Rp 10.503.630.267,-
% Capaian Keuangan : 77%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan survei lapangan berbasis data (volume lalu lintas, titik rawan kecelakaan, blackspot);
- Pemanfaatan e-katalog untuk barang standar;
- Pengawasan lapangan secara rutin dan terjadwal.

IKK3.3.2 Jumlah lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 secara jelas diamanahkan bahwa setiap jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Secara umum perlengkapan jalan dibagi 2 jenis yaitu perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 100% maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

2) Faktor Keberhasilan

- Analisis tren kecelakaan (waktu, jenis, penyebab);
- Volume dan lokasi tepat sasaran;
- Kebutuhan jelas berbasis data lalu lintas, tingkat kecelakaan, dan fungsi jalan;
- Pengawasan lapangan aktif (kualitas, waktu, kuantitas);
- Anggaran cukup dan berkelanjutan.

3) Faktor Kegagalan

- Penetapan Lokasi Tidak Akurat;
- Salah Analisis Penyebab Kecelakaan;
- Pemotongan anggaran mendadak.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK3.3.2 Jumlah lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan \%)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{100}{100} \text{ (dalam satuan \%)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 100\%$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja IKK3.3.2 Jumlah lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4639.RAC.053 Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional):

Pagu	: Rp 1.300.000.000,-
Realisasi	: Rp 1.283.521.629,-
% Capaian Keuangan	: 98%

a.5) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan survei lapangan berbasis data (volume lalu lintas, titik rawan kecelakaan, blackspot);
- Pemanfaatan e-katalog untuk barang standar;
- Pengawasan lapangan secara rutin dan terjadwal.

II.2.7. SK4 Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pelaksanaan APBN pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai DIPA merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran berdasarkan RKA-K/L yang telah disetujui oleh DPR-RI dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam proses penerbitan dokumen DIPA, semua informasi yang tercantum dalam DIPA berasal dari RKA-K/L yang telah disusun. Oleh karena itu, informasi yang dituangkan pada saat penyusunan RKA-K/L harus dilakukan secara benar dan lengkap serta dilengkapi dengan dokumen pendukungnya, sehingga DIPA yang dihasilkan siap digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 3 Kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 3 Kegiatan maka capaian kinerja pada Triwulan III mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

2) Faktor Keberhasilan

- Terlaksananya penyusunan pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu alokasi dan pagu anggaran dengan tepat waktu;
- Penyusunan pagu anggaran secara transparan dengan dilaksanakan rapat dengan pejabat satuan kerja.

3) Faktor Kegagalan

- Keterbatasan pengetahuan SDM sehingga memiliki potensi keterlambatan untuk penyusunan pagu anggaran.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{3}{3} \text{ (dalam satuan Kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 3 \text{ Kegiatan}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja IKK 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4596.EBB.906 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi, 4670. EBA.994 Layanan Perkantoran 4671. EBA 994 Layanan Perkantoran:

Pagu : Rp 22.427.942.000,-

Realisasi : Rp 20.009.981.607,-

% Capaian Keuangan : 89%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

- Mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait penyusunan pagu anggaran;
- Membuat tim penyusunan anggaran;
- Memperhatikan *deadline*/ waktu penyusunan anggaran.

IKK 4.2 Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban Unit Organisasi yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri dari kegiatan penyusunan Rencana Strategis, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pemantauan dan Pengamatan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 80 Nilai jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 80 Nilai maka capaian kinerja pada Triwulan III mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum :

- Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan,

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Faktor Keberhasilan

- Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Monitoring Rencana Aksi, Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Penyusunan Laporan Monitoring Rencana Aksi tepat waktu 5 Hari Kerja sesuai dengan ketentuan.

3) Faktor Kegagalan

- Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK 4.2 Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Nilai)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{80}{80} \text{ (dalam satuan Nilai)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 80 \text{ Nilai}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja IKK 4.2 Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{80}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun

2025 dengan 4596.EBB.906 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi, 4670. EBA.994 Layanan Perkantoran 4671. EBA 994 Layanan Perkantoran:

Pagu : Rp 22.427.942.000,-

Realisasi : Rp 20.009.981.607,-

% Capaian Keuangan : 89%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

- Mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait penyusunan dokumen SAKIP;
- Memperhatikan *deadline*/ waktu penyusunan dokumen SAKIP.

IKK 4.3 Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) sebanyak 90 Nilai jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 90 Nilai maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

2) Faktor Keberhasilan

- Terlaksananya pengelolaan UP/TUP TA.2025;
- Terlaksananya pengisian capaian output setiap 5HK;
- Meminimalisir revisi halaman III DIPA agar dapat mempertahankan nilai IKPA.

3) Faktor Kegagalan

- Terdapat deviasi halaman III DIPA;
- Pengelolaan UP/TUP tidak maksimal.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK 4.3 Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA), dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Nilai)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{90}{90} \text{ (dalam satuan Nilai)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 90 \text{ Nilai}$$

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK 4.3 Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA), dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{90}{90} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4596.EBB.906 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi, 4670. EBA.994 Layanan Perkantoran 4671. EBA 994 Layanan Perkantoran:

Pagu	: Rp 22.427.942.000,-
Realisasi	: Rp 20.009.981.607,-
% Capaian Keuangan	: 89%

- a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang
- Merencanakan RPD dengan maksimal agar tidak terjadi deviasi pada halaman III DIPA;
 - Berkoordinasi dengan KANWIL DJA terkait revisi DIPA.

IKK4.5 Tingkat pengelolaan arsip (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang komperhensif dan terpadu di Kementerian Perhubungan diperlukan suatu pedoman untuk mengatur arsip yang handal dan sistematis yang mengacu prosedur dan ketentuan peraturan perundang – undangan

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Tingkat pengelolaan arsip (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) sebanyak 1 Kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 1 Kegiatan maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Undang – Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 tentang Kearsipan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1958 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

2) Faktor Keberhasilan

- Terciptanya arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dilaksanakannya arsip menggunakan digitalisais.

3) Faktor Kegagalan

- Terdapat SDM yang masih sulit melakukan perubahan dari konvensional ke digital.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK4.5 Tingkat pengelolaan arsip (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses), dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{1}{1} \text{ (dalam satuan Kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 6 \text{ Kegiatan}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK4.5 Tingkat pengelolaan arsip (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses), dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4596.EBB.906 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi, 4670. EBA.994 Layanan Perkantoran 4671. EBA 994 Layanan Perkantoran:

Pagu	: Rp 22.427.942.000,-
Realisasi	: Rp 20.009.981.607,-
% Capaian Keuangan	: 89%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

- Mengadakan sosialisasi klasifikasi arsip sesuai dengan peraturan.

IKK 4.6 Tingkat keberhasilan pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Melalui peraturan dan surat edaran terbaru, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Tingkat keberhasilan pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) sebanyak 90 Nilai jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 90 Nilai maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)

2) Faktor Keberhasilan

- Pelaporan kinerja akurat dan tepat waktu;
- Adanya pengembangan kompetensi/ pelatihan pegawai;
- Monitoring pelaksanaan secara berkala.

3) Faktor Kegagalan

- Dokumen ada tetapi tidak dijalankan;
- Mengejar kelengkapan dokumen semata;
- Inovasi tidak berdampak.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK 4.6 Tingkat keberhasilan pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE), dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Nilai)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{90}{90} \text{ (dalam satuan Nilai)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 2 \text{ Nilai}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja IKK 4.6 Tingkat keberhasilan pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE), dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{90}{90} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4596.EBB.906 Pengadaan Perangkat

Pengolah Data dan Informasi, 4670. EBA.994 Layanan
Perkantoran 4671. EBA 994 Layanan Perkantoran:

Pagu : Rp 22.427.942.000,-

Realisasi : Rp 20.009.981.607,-

% Capaian Keuangan : 89%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

- Peningkatan Budaya Kerja dan Integritas Pegawai;
- Publikasi prosedur, waktu, dan biaya layanan secara terbuka;
- Penguatan disiplin dan profesionalisme ASN.

IKK4.7 Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 Kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK sebesar 1 Kegiatan maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

2) Faktor Keberhasilan

- PPK dan Pokja memiliki sertifikasi pengadaan;
- Optimalisasi LPSE dan e-katalog;
- RUP disusun lebih awal dan sesuai kebutuhan.

3) Faktor Kegagalan

- Perencanaan yang Tidak Matang;
- Komunikasi yang lemah antara unit teknis, PPK, dan Pokja;
- RUP tidak disusun tepat waktu.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK4.7 Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{1}{1} \text{ (dalam satuan Kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 1 \text{ Kegiatan}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja IKK4.7 Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 100 \%$$

6) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4596.EBB.906 Pengadaan Perangkat Pengolah Data

dan Informasi, 4670. EBA.994 Layanan Perkantoran 4671. EBA 994 Layanan Perkantoran:

Pagu : Rp 22.427.942.000,-
Realisasi : Rp 20.009.981.607,-
% Capaian Keuangan : 89%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

- Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan) secara tepat waktu dan akurat;
- Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik (LPSE/e-purchasing);
- Dokumentasi dan pelaporan pengadaan secara tertib.

IKK8 Kegiatan terkait sistem merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Manajemen Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Manajemen SDM adalah pengelolaan pegawai untuk menghasilkan pegawai profesional, memiliki nilai dasar, menjunjung etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan terkait sistem merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) sebanyak 9 Kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II PK sebesar 9 Kegiatan maka capaian kinerja pada Triwulan IV mencapai 100%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Keuangan Nomo 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

- Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

2) Faktor Keberhasilan

- Terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan;
- Tersedianya SDM yang berkompeten dibidangnya;
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penginputan pembayaran.

3) Faktor Kegagalan

- Pelaksanaan pelatihan yang tidak efektif;
- Tidak ada tindak lanjut setelah melakukan pelatihan;
- Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan SDM.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja IKK8 Kegiatan terkait sistem merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor), dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan Kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{9}{9} \text{ (dalam satuan Kegiatan)}$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = 9 \text{ Kegiatan}$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian IKK8 Kegiatan terkait sistem merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor), dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{9}{9} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun Pagu, Realisasi dan Capaian keuangan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan 4596.EBB.906 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi, 4670. EBA.994 Layanan Perkantoran 4671. EBA 994 Layanan Perkantoran:

Pagu	: Rp 22.427.942.000,-
Realisasi	: Rp 20.009.981.607,-
% Capaian Keuangan	: 89%

a.4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

- Mengadakan kegiatan peningkatan motivasi pegawai guna untuk meningkatkan semangat pegawai;
- Meningkatkan kompetensi pelatihan pegawai;
- Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar Rp. 52.492.278.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Tabel Rincian Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu		Persentase Pagu
RM	Rp.	51.012.758.000,-	
PNBP	Rp.	1.479.520.000,-	
SBSN	Rp.	-	
Total	Rp.	52.492.278.000,-	100%

Sumber : Berdasarkan data omspan

Namun pada Triwulan III terdapat penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 59.984.371.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Tabel Rincian Sumber Dana Pagu Revisi Realokasi I Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu		Persentase Pagu
RM	Rp.	58.141.251.000,-	
PNBP	Rp.	1.843.120.000,-	
SBSN	Rp.	-	
Total	Rp.	59.984.371.000,-	100%

Sumber : Berdasarkan data ompsan

Pada Triwulan IV terdapat penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 61.471.278.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Tabel Rincian Sumber Dana Pagu Revisi II Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu		Persentase Pagu
RM	Rp.	59.628.158.000,-	97%
PNBP	Rp.	1.843.120.000,-	2,99%
SBSN	Rp.	-	
Total	Rp.	61.471.278.000,-	100%

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel 2. 8 Rincian Per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu		Persentase Pagu
Belanja Pegawai	Rp.	16.548.912.000,-	31,53%
Belanja Barang	Rp.	24.406.508.000,-	46,50%
Belanja Modal	Rp.	11.536.858.000,-	19,70%
Total	Rp.	52.492.278.000,-	100%

Sumber : Berdasarkan data omspan

Tabel 2. 9 Tabel Rincian Per Jenis Belanja Pagu Revisi I Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu		Persentase Pagu
Belanja Pegawai	Rp.	19.030.205.000,-	31,73%
Belanja Barang	Rp.	26,649,198,000,-	44,43%
Belanja Modal	Rp.	14.304.968.000,-	23,84%
Total	Rp.	59.984.371.000,-	100%

Sumber : Berdasarkan data ompsan

Tabel 2. 10Tabel Rincian Per Jenis Belanja Pagu Revisi II Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu		Persentase Pagu
Belanja Pegawai	Rp.	16.907.109.000,-	30%
Belanja Barang	Rp.	25.449.198.000,-	43%
Belanja Modal	Rp.	19.114.971.000,-	23%
Total	Rp.	61,471,278,000,-	100%

Sumber : Berdasarkan data ompsan

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA BPTD Kelas III Bengkulu TA. 2025 akibat adanya Efisiensi Belanja K/L dalam pelaksanaan APBN TA. 2025.

Penambahan dan Pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA – 022.03.2.690666/2025 tanggal 2 Desember 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.492.278.000,-;
2. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-184/AG.3/2025 tanggal 22 Februari 2025 hal Pengesahan Anggaran Efisiensi Lingkup Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Tahun 2025 (Revisi ke 2);

3. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-293/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Maret 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA.2025 (Revisi ke-4);
4. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-492/WPB.09/2025 tanggal 23 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker 690666 (Revisi ke-3);
5. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-901/WPB.09/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker 690666 ke-5;
6. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-678/AG/AG.3/2025 tanggal 11 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat TA.2025 (Revisi 7);
7. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-949/WPB.09/2025 tanggal 14 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker 690666 ke-7;
8. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-782/AG/AG.3/2025 tanggal 12 September 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 (Revisi 8);
9. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-1103/WPB.09/2025 tanggal 6 Oktober 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker 690666 ke-9;
10. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-871/AG/AG.3/2025 tanggal 13 Oktober 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 (Revisi ke 9);
11. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor S-1349/WPB.09/2025 tanggal 23 Oktober 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker 690666 ke-11;
12. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-512/PB.2/2025 tanggal 21 November 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Belanja Operasional pada Satker Lingkup Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

2. Refocussing Anggaran Tahun 2025

a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA BPTD Kelas III Bengkulu yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 2 kali revisi DIPA. Berikut adalah rincian histori revisi per sumber dana dan jenis belanja.

Tabel 2. 11 Rincian Revisi Per Sumber Dana TA. 2025

Uraian	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	51.012.758.000,-	1.479.520.000,-	0	52.492.278.000,-
Revisi Ke I	51.012.758.000,-	1.479.520.000,-	0	52.492.278.000,-
Revisi Ke II	51.012.758.000,-	1.479.520.000,-	0	52.492.278.000,-
Revisi Ke III	51.012.758.000,-	1.479.520.000,-	0	52.492.278.000,-
Revisi Ke IV	51.012.758.000,-	1.479.520.000,-	0	52.492.278.000,-
Revisi Ke V	51.012.758.000,-	1.479.520.000,-	0	52.492.278.000,-
Revisi Ke VI	52.841.251.000,-	1.479.520.000,-	0	54.320.771.000,-
Revisi Ke VII	52.841.251.000,-	1.479.520.000,-	0	54.320.771.000,-
Revisi Ke VIII	58.141.251.000,-	1.843.120.000,-	0	59.984.371.000,-
Revisi Ke IX	58.141.251.000,-	1.843.120.000,-	0	59.984.371.000,-
Revisi Ke X	61.751.254.000,-	1.843.120.000,-	0	63,594,374,000,-
Revisi Ke XI	61.751.254.000,-	1.843.120.000,-	0	63,594,374,000,-
Revisi Ke XII	59.628.158.000,-	1.843.120.000,-	0	61.471.278.000,-

Sumber : Data diolah oleh Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bengkulu

b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel 2. 12 Rincian Revisi Per Jenis Belanja TA. 2025

Uraian	Sumber Dana			Jumlah
	B. Pegawai	B. Barang	B. Modal	
Pagu Awal	16.548.912.000,-	24.406.508.000,-	11.536.858.000,-	52.492.278.000,-
Revisi Ke I	16.548.912.000,-	24.406.508.000,-	11.536.858.000,-	52.492.278.000,-
Revisi Ke II	16.548.912.000,-	24.406.508.000,-	11.536.858.000,-	52.492.278.000,-
Revisi Ke III	16.548.912.000,-	24.406.508.000,-	11.536.858.000,-	52.492.278.000,-
Revisi Ke IV	16.548.912.000,-	24.406.508.000,-	11.536.858.000,-	52.492.278.000,-
Revisi Ke V	16.548.912.000,-	24.406.508.000,-	11.536.858.000,-	52.492.278.000,-
Revisi Ke VI	19.030.205.000,-	23.753.708.000,-	11.536.858.000,-	54.320.771.000,-
Revisi Ke VII	19.030.205.000,-	23.753.708.000,-	11.536.858.000,-	54.320.771.000,-
Revisi Ke VIII	19.030.205.000,-	26,649,198,000,-	14.304.968.000,-	59.984.371.000,-
Revisi Ke IX	19.030.205.000,-	26,649,198,000,-	14.304.968.000,-	59.984.371.000,-
Revisi Ke X	19.030.205.000,-	26,649,198,000,-	17.914.971.000,-	63,594,374,000,-

Revisi Ke XI	19.030.205.000,-	26,649,198,000,-	17.914.971.000,-	63,594,374,000,-
Revisi Ke XII	16,907,109,000	25,449,198,000	19,114,971,000,-	61,471,278,000,-

Sumber : Data diolah oleh Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bengkulu

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel 2. 13 Rincian Realokasi Per Sumber Dana TA. 2025

Jenis Belanja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir
B. Pegawai	16.548.912.000,-	-	16.548.912.000,-	16.548.912.000,-	-	16.548.912.000,-	16.548.912.000,-	19.030.205.000,-	19.030.205.000,-	16.548.912.000,-	16.907.109.000,-	16.907.109.000,-
B. Barang	24.406.508.000,-	-	24.406.508.000,-	24.406.508.000,-	-	24.406.508.000,-	24.406.508.000,-	26.649.198.000,-	26.649.198.000,-	24.406.508.000,-	25.449.198.000,-	25.449.198.000,-
RM	24.126.988.000,-	-	24.126.988.000,-	24.126.988.000,-	-	24.126.988.000,-	24.126.988.000,-	24.126.988.000,-	24.126.988.000,-	24.126.988.000,-	25.169.678.000,-	25.169.678.000,-
PNBP	279.520.000,-	-	279.520.000,-	279.520.000,-	-	279.520.000,-	279.520.000,-	279.520.000,-	279.520.000,-	279.520.000,-	279.520.000,-	279.520.000,-
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Modal	11.536.858.000,-	-	11.536.858.000,-	11.536.858.000,-	-	11.536.858.000,-	11.536.858.000,-	14.304.968.000,-	14.304.968.000,-	11.536.858.000,-	19.114.971.000,-	19.114.971.000,-
RM	10.336.858.000,-	-	10.336.858.000,-	10.336.858.000,-	-	10.336.858.000,-	10.336.858.000,-	12.741.368.000,-	12.741.368.000,-	10.336.858.000,-	17.551.371.000,-	17.551.371.000,-
PNBP	1.200.000.000,-	-	1.200.000.000,-	1.200.000.000,-	-	1.200.000.000,-	1.200.000.000,-	1.563.600.000,-	1.563.600.000,-	1.200.000.000,-	1.563.600.000,-	1.563.600.000,-
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	52.492.278.000,-	-	52.492.278.000,-	52.492.278.000,-	-	52.492.278.000,-	52.492.278.000,-	59.984.371.000,-	59.984.371.000,-	52.492.278.000,-	61.471.278.000,-	61.471.278.000,-

Sumber : Berdasarkan data omspan

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2. 14 Rincian Realisasi Anggaran Per Program – Program Kegiatan TA. 2025

Kode	Program/ Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
022.03.690666	BPTD Kelas III Bengkulu	52.492.278.000	14.454.397.450	28%	52.492.278.000	21.906.402.760	41,73%	59.984.371.000	32.162.191.190	59,99%	61,471,278,000	51,254,332,707	
022.03.GA													
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7.580.327.000	289.761.000	4%	7.580.327.000	918.591.811	12,12%	7.580.327.000	4.571.886.235	60,31%	7,580,327,000	7,579,886,441	
4638	Pelayanan Transportasi Darat	3.149.168.000	566.634.778	18%	3.149.168.000	909.077.258	33,80%	3.149.168.000	1.572.891.685	25,41%	6,649,171,000	6,168,107,009	
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	15.025.725.000	7.597.947.290	51%	15.025.725.000	8.546.089.182	56,87%	19.089.325.000	10.127.224.402	65,43%	19,089,325,000	15,450,875,341	
4640	Kegiatan Tupoksi	4.314.638.000	577.702.813	13%	4.314.638.000	638.872.113	14,80%	5.614.513.000	780.706.113	37,86%	5,724,513,000	2,045,482,309	

Kode	Program/ Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	Ditjen Perhubungan Darat												
022.03.WA													
4596	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	630.000.000	0	0%	630.000.000	0	0%	630.000.000	0	0%	630,000,000	0	
4670	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.243.508.000	1.301.901.918	25%	5.243.508.000	2.208.008.669	42,10%	4.890.833.000	2.633.242.529	80,46%	4,890,833,000	3,197,344,253	
4671	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16.548.912.000	4.120.449.651		16.548.912.000	8.685.763.727	52,48%	19.030.205.000	12.476.240.226	65,56%	16,907,109,000	16,812,637,354	
TOTAL		52.492.278.000	14.454.397.450	28%	52.492.278.000	21.906.402.760	41,73%	59.984.371.000	32.162.191.190	59,99%	61,471,278,000	51,254,332,707	

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2021 - 2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2021 – 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 15 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
1	2021	-	-	-
2	2022	-	-	-
3	2023	3.730.617.000	3.730.617.000	3.730.617.000
4	2024	40.266.614.000	42.138.266.000	39.606.460.000
5	2025	52.492.278.000	61,471,278,000	51,254,332,707

Sumber : Berdasarkan data omspan

Dari tabel diatas dapat dilihat pagu pada awal tahun 2023 s.d 2025 terdapat kenaikan setiap tahunnya. Pada Triwulan I tahun 2025 terdapat Blokir anggaran sebesar Rp. 12.930.462.000, Kemudian dari anggaran tersebut s.d Triwulan III terdapat Relaksasi sebesar Rp. 2.947.294.000,- . Sehingga blokir anggaran menjadi Rp. 9.983.168.000,-

Kemudian pada Triwulan III terdapat Realokasi Anggaran sehingga terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 7.492.093.000,- dari penambahan pagu anggaran tersebut semula Rp. 52.492.278.000,- menjadi Rp. 59.984.371.000,-.

Pada Triwulan IV terdapat Realokasi Anggaran Tahap II sehingga terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp.

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per sasaran program dan kegiatan pada tahun 2025 s.d Triwulan III dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 16 Realisasi Anggaran Triwulan I s.d III per Sasaran Program dan Kegiatan TA. 2025

Kode	Program/ Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
022.03.690666	BPTD Kelas III Bengkulu	52.492.278.000	14.454.397.450	28%	52.492.278.000	21.906.402.760	41,73%	59.984.371.000	32.162.191.190	53,61%			
022.03.GA													
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7.580.327.000	289.761.000	4%	7.580.327.000	918.591.811	12,12%	7.580.327.000	4.571.886.235	60,31%	7,580,327,000	7,579,886,441	
4638	Pelayanan Transportasi Darat	3.149.168.000	566.634.778	18%	3.149.168.000	909.077.258	33,80%	3.149.168.000	1.572.891.685	25,41%	6,649,171,000	6,168,107,009	
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	15.025.725.000	7.597.947.290	51%	15.025.725.000	8.546.089.182	56,87%	19.089.325.000	10.127.224.402	65,43%	19,089,325,000	15,450,875,341	
4640	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	4.314.638.000	577.702.813	13%	4.314.638.000	638.872.113	14,80%	5.614.513.000	780.706.113	37,86%	5,724,513,000	2,045,482,309	
022.03.WA													
4596	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	630.000.000	0	0%	630.000.000	0	0%	630.000.000	0	0%	630.000.000	0	
4670	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.243.508.000	1.301.901.918	25%	5.243.508.000	2.208.008.669	42,10%	4.890.833.000	2.633.242.529	80,46%	4,890,833,000	3,197,344,253	
4671	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16.548.912.000	4.120.449.651		16.548.912.000	8.685.763.727	52,48%	19.030.205.000	12.476.240.226	65,56%	16,907,109,000	16,812,637,354	

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 32.162.191.190,-** Atau mencapai **59,99%** dari total pagu sebesar **Rp. 52.492.278.000,-**

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja s.d Triwulan IV TA. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 17 Realisasi Anggaran Triwulan I s.d IV per Jenis Belanja TA. 2025

Jenis Belanja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
BPTD Kelas III Bengkulu	52.492.278.000	14.454.397.450	28%	52.492.278.000	21.906.402.760	41,73%	59.984.371.000,-	32.162.191.190,-	53.6%	61.471.278.000	51.254.330.605	83.38%
Belanja Pegawai	16.548.912.000	4.120.449.651	25%	16.548.912.000	8.685.763.727	52,49%	19.030.205.000,-	12.476.240.226,-	65.5%	16.907.109.000	16.812.635.252	99.44%
Belanja Barang	24.406.508.000	4.902.789.049	20%	24.406.508.000	7.398.889.033	30,32%	26.649.198.000,-	12.692.198.983,-	47.6%	25.449.198.000	19.168.781.240	75.32%
Belanja Modal	11.536.858.000	5.431.158.750	47%	11.536.858.000	5.821.750.000	5046%	14.304.968.000,-	6.993.751.981,-	48.8%	19.114.971.000	15.272.914.113	79.90%
	52.492.278.000	14.454.397.450	28%	52.492.278.000	21.906.402.760	41,73%	59.984.371.000,-	32.162.191.190,-	53.6%	61.471.278.000	51.254.330.605	83.38%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Triwulan I s.d Triwulan IV TA. 2025 mengalami kenaikan 14% dalam Triwulannya. Kemudian, pada Triwulan IV terdapat Realokasi anggaran sehingga terdapat penambahan pada pagu anggaran yang semula Rp. 52.492.278.000,- menjadi Rp. 61,471,278,000,-.

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per sumber dana s.d Triwulan III TA. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 18 Realisasi Anggaran Triwulan I s.d III per Sumber Dana TA. 2025

Jenis Belanja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
BPTD Kelas III Bengkulu	52.492.278.000	14.454.397.450	27,54%	52.492.278.000	21.906.402.760	41,73%	59.984.371.000,-	32.162.191.190	53.6%	61.471.278.000	51.254.330.605	83.38%
RM	51.292.278.000	13.430.097.000	26,18%	51.292.278.000	20.882.402.760	40,71%	58.141.251.000	31.137.891.190	53.5%	59.628.158.000	49.866.916.305	83.63%
PNBP	1.200.000.000	1.024.300.000	85,36%	1.200.000.000	1.024.300.000	85,36%	1.843.120.000	1.024.300.000	55%	1.843.120.000	1.387.414.300	75.28%
SBSN												
	52.492.278.000	14.454.397.450	28%	52.492.278.000	21.906.402.760	41,73%	59.984.371.000,-	32.162.191.190	53.61%			

4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu memiliki total Pagu Awal sebesar Rp. 52.492.278.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Kemudian, pada Triwulan III dan IV terdapat penambahan pagu sehingga terdapat perubahan pada pagu anggaran menjadi Rp. 61.471.278.000,- (Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang telah di realisasikan sampai dengan Desember 2025/ Triwulan IV sebesar Rp. 51.254.330.605,- (Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan yang belum terlaksana dan terdapat blokir:

Semula:

- a. Belanja Barang : **Rp. 7.215.356.000,-**
 - Belanja Barang Non Kontraktual : Rp. 6.414.452.000,-
 - Belanja Barang Kontraktual : Rp. 800.904.000,-
- b. Belanja Modal : **Rp. 5.451.106.000,-**
 - Belanja Modal Non Kontraktual : Rp. 264.000.000,-
 - Belanja Modal Kontraktual : Rp. 5.451.106.000,-
- c. Total Nilai Blokir sebesar **Rp. 12.930.462.000,-**

Menjadi:

- a. Belanja Barang : **Rp. 6.157.685.000,-**
 - Belanja Barang Non Kontraktual : Rp. 5.745.115.000,-
 - Belanja Barang Kontraktual : Rp. 412.570.000,-
- b. Belanja Modal : **Rp. 3.825.483.000,-**
 - Belanja Modal Non Kontraktual : Rp. 264.000.000,-
 - Belanja Modal Kontraktual : Rp. 3.561.483.000,-
- c. Total Nilai Blokir sebesar **Rp. 9.983.168.000,-**

Pada Triwulan III terdapat Relaksasi sebesar **Rp. 2.947.294.000,-** sehingga total nilai blokir yang semula **Rp. 12.930.462.000,-** menjadi **Rp. 9.983.168.000,-**

- 2. Dari Total Pagu sebesar **Rp. 61.471.278.000,-** pagu efektif BPTD Kelas III Bengkulu yaitu sebesar **Rp. 51.488.110.000,-**
- 3. Terdapat kegiatan Prioritas Nasional yang di blokir yaitu Pekan Nasional Keselamatan Jalan sebesar **Rp.200.000.000,-**

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu terdapat kegiatan yang dilakukan efisiensi anggaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 19 Efisiensi Sumber Daya Keuangan

No	Sasaran Program		Triwulan I			Triwulan II		
			% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi) Triwulan I	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	75%	8%	8%	100%	17%	8%
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	100%	-	-	100%	-	-
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	66,6%	51%	41%	66,6%	57%	41%
4	SK5	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100%	12%	87%	100%	15%	87%
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	100%	25%	7%	100%	50%	7%
Total			88,33%	28%	25%	93,33%	42%	25%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui posisi efisiensi pada Triwulan I dan II sebesar Rp. 12.930.462.000 sedangkan Triwulan III posisi efisiensi sebesar Rp. 9.983.168.000,- dengan persentase sebesar 16% terhadap pagu Revisi II sebesar Rp. 61.471.278.000,-

Tabel 2. 20 Efisiensi Sumber Daya Keuangan Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Progam		Triwulan III		
			% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi) Triwulan III
1	SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	100%	32%	0%
2	SK3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI) lintas negara dan pedesaan antar provinsi	100%	46%	16%
3	SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	100%	70%	1%
4	SK7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan	100%	-	-
5	SK8	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi	100%	-	-
6	SK 9	Meningkatnya keselamatan angkutan penumpang dan barang	100%	49%	16%
7	SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	100%	43%	7%
8	SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	136%	55%	20%
9	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	0%	0%	100%
10	SK13	Meningkatnya layanan manajemen SDM Internal	92%	53%	20%
Total			92,8%	54%	17%

Tabel 2. 21 Efisiensi Sumber Daya Keuangan Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program		Triwulan IV		
			% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi) Triwulan IV
1	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	100%	100%	0%
2	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	100%	99.99%	0%
3	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan	100%	56%	43%
4	SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	100%	98%	1,24%
5	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	100%	92%	7,32%
6	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	100%	79%	20%
7	SK4	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	100%	89%	10%
Total			92,8%	87%	11%

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Jumlah SDM di lingkungan BPTD Kelas III Bengkulu saat ini adalah sejumlah 162 yang terdiri dari :

Tabel 2. 22 Analisis Sumber Daya Manusia

NO	KETERANGAN	ASN	PPPK	TOTAL
1	KANTOR INDUK	71	5	76
2	TERMINAL SIMPANG NANGKA	13	10	23
3	UPPKB PADANG ULAK TANDING	23	6	29
4	TERMINAL AIR SEBAKUL	24	6	30
5	UPPKB TAIS	1	2	3
6	SATPEL UPPKB MAJE	1	0	3
TOTAL		162		

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja di Lingkungan BPTD Kelas III Bengkulu antara lain :

- a. Redistribusi pegawai di lingkungan BPTD Kelas III Bengkulu
Redistribusi ini dilaksanakan dengan pemindahan pegawai dari antar unit kerja di lingkungan BPTD Kelas III Bengkulu dengan tidak mengganggu beban kerja dari unit kerja tersebut.
- b. Mutasi dari unit kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
Mutasi ini merupakan perpindahan pegawai dari unit kerja di luar BPTD Kelas III Bengkulu namun masih dalam Ditjen Perhubungan Darat

3. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/ Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain :

1. Adanya potensi deviasi terhadap Rencana Penarikan Dana setiap bulan jika tidak dilakukan koordinasi, pengendalian dan perencanaan yang tepat;
2. Adanya pagu alokasi anggaran yang di blokir mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.



BAB III

PENUTUP

BAB III

PENUTUP

III.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu, Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan IV ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan kegiatan untuk Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu dengan segala keterbatasan yang ada dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini terdapat 19 (Dua Puluh) Indikator Kinerja yang capaiannya sesuai dari target yang telah ditentukan;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu juga akan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
4. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 dengan total jumlah indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 Indikator dari 7 Sasaran Kegiatan. Hal ini mendukung terlaksananya kegiatan dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029.
 - Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan terealisasi sebesar 5 Trayek (target 5 Trayek) tercapai 100%;

- Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP terealisasi sebesar 1 Lintasan (target 1 Lintasan) tercapai 100%;
- Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM terealisasi sebesar 2 Unit (target 2 Unit) tercapai 100%;
- Jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi 1 Unit (target 1 Unit) tercapai 100%;
- Jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM terealisasi 1 Unit (target 1 Unit) tercapai 100%;
- Jumlah monitoring evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas pokok dan fungsi LLAJ terealisasi 11 Kegiatan (target 11 Kegiatan) tercapai 100%;
- Penyusunan dokumen teknis terkait TUSI LLAJ terealisasi 1 Dokumen (target 1 Dokumen) tercapai 100%;
- Jumlah pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi 1 Unit (target 1 Unit) tercapai 100%;
- Jumlah operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM terealisasi 2 Unit (target 2 Unit) tercapai 100%;
- Jumlah pengadaan kegiatan pendukung Uji Kalibrasi terealisasi 2 Paket (target 2 Paket) tercapai 100%;
- Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis terealisasi 408 Unit (target 408 Unit) tercapai 100%;
- Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman terealisasi 100% (target 100%) tercapai 100%;
- Kegiatan perencanaan pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 3 Kegiatan (target 3 Kegiatan) tercapai 100%;
- Kegiatan terkait akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 80 Nilai (target 80 Nilai) tercapai 100%;
- Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA) terealisasi 90 Nilai (target 90 Nilai) tercapai 100%;
- Tingkat pengelolaan arsip (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) terealisasi 1 Kegiatan (target 1 Kegiatan) tercapai 100%;

- Tingkat keberhasilan pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) terealisasi 90 Nilai (target 90 Nilai) tercapai 100%;
- Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa terealisasi 1 Kegiatan (target 1 Kegiatan) tercapai 100%;
- Kegiatan terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) terealisasi 9 Kegiatan (target 9 Kegiatan) tercapai 100%.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET PK	Triwulan IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				T	R	C			
SK1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK					100%	Tercapai		
IKK 1.1.1.A	Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan	Trayek	5	5	5	100%		Menyediakan atau memberikan subsidi untuk pelayanan angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah - daerah tersebut	SARANA
SK1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan					100%	Tercapai		
IKK1.2.1.B	Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP	Lintasan	1	1	1	100%		Menyediakan atau memberikan subsidi untuk pelayanan angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah - daerah tersebut	SARANA
SK2.1	Meningkatnya pelayanan public sektor transportasi jalan					100%	Tercapai		
IKK2.1.2	Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	2	2	2	100%		1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staff Teminal Tipe A 2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional Terminal Tipe A	PRASARANA
IKK2.1.3	Jumlah fasilitas penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	1	100%			PRASARANA
IKK2.1.4	Jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM	Unit	1	1	1	100%			PRASARANA
IKK2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait peningkatan pelayanan Tugas dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	11	11	11	100%			LLAJ
IKK2.1.6	Jumlah Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen	1	1	1	100%			PRASARANA
SK2.2	Meninkatnya pelayanan public sektor transportasi ASDP					100%	Tercapai		
IKK2.2.1	Jumlah Pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	1	100%		1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staff pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional pelabuhan penyeberangan	PRASARANA
IKK2.2.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan penyeberangan sesuai SPM	Unit	2	2	2	100%			PRASARANA

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET PK	Triwulan IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				T	R	C			
SK3.2 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety						100%	Tercapai		
IKK3.2.3	Jumlah pengadaan kegiatan pendukung uji kalibrasi	Paket	2	2	2	100%		4.Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggungjawab seluruh staf UPPKB di Bengkulu; 5.Melakukan monitoring terhadap alat kalibrasi pengujian kendaraan bermotor dan melakukan perawatan secara berkala.	SARANA
SK3.3 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan						100%	Tercapai		
IKK3.3.1	Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	408	408	408	100%		1.Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan;	LLAJ
IKK3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	%	100	100	100	100%		2.Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3.Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	LLAJ
SK4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat						100%	Tercapai		
IKK4.1	Kegiatan perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	100%		Melakukan penyusunan pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran	TU
IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	80	100%		Melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kinerja Tahunan, Monitoring Renaksi, LMCK dan LKIP	TU
IKK4.3	Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	90	90	90	100%		Melaksanakan pengelolaan UP/TUP, Pengisian Capaian Output, dan mempertahankan Kualitas Perencanaan Anggaran	TU
IKK4.5	Tingkat pengelolaan arsip (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	Kegiatan	1	1	1	100%		Pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip (melakukan pembayaran menggunakan aplikasi SAKTI, melakukan kontrak menggunakan aplikasi E-Katalog, Melakukan pengiriman surat masuk dan keluar menggunakan aplikasi SRIKANDI)	TU
IKK4.6	Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	90	90	90	100%		Melaksanakan sosialisasi anti korupsi, kolusi dan nepotisme kepada seluruh pegawai	TU
IKK4.7	Kegiatan tata Kelola barang dan jasa	Kegiatan	1	1	1	100%		Pelaksanaan kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa	TU

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET PK	Triwulan IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				T	R	C			
IKK4.8	Kegiatan terkait system merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	9	9	9	100%		Pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan dan uang lembur	TU
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100%			
Rata – Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						100%			
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100%						19			
Jumlah Indikator Kinerja Program Kurang dari 100%						0			



LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja Tahun 2025

[PERJANJIAN KINERJA 2025 - Google Drive](#)

LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN



Rencana Kinerja Tahunan 2025

[RENCANA KINERJA TAHUNAN - Google Drive](#)

LAMPIRAN 3
RENAKSI



Renaksi 2025

[RENAKSI 2025 - Google Drive](#)

LAMPIRAN 4
MONITORING RENAKSI



Monitoring Renaksi 2025
[2025 - Google Drive](#)



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI